



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya International Labour Organization (ILO) dalam
Mempromosikan Isu Sustainable Fashion di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Sri Nastiti Andra Pradipta

2017330051

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya International Labour Organization (ILO) dalam
Mempromosikan Isu Sustainable Fashion di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Sri Nastiti Andra Pradipta

2017330051

Pembimbing

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Sri Nastiti Andra Pradipta
Nomor Pokok : 2017330051
Judul : Upaya International Labour Organization (ILO) dalam
Mempromosikan Isu Sustainable Fashion di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 23 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

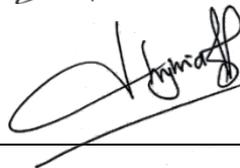
Sekretaris

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

: 

Anggota

Sylvia Yazid, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nastiti Andra Pradipta

NPM : 2017330051

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya International Labour Organization (ILO) dalam Mempromosikan Isu Sustainable Fashion di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juli 2021



Sri Nastiti Andra Pradipta

ABSTRAK

Nama : Sri Nastiti Andra Pradipta

NPM : 2017330051

Judul : Upaya International Labour Organization (ILO) dalam Mempromosikan Isu Sustainable Fashion di Indonesia

Kemunculan istilah *sustainable fashion* sendiri merupakan bentuk dari menerapkan mode ‘beretika’ yang menjadi kontestan terhadap praktik *unsustainable fashion*. Sebagai istilah yang dikenal pada tingkatan internasional, *sustainable fashion* secara resmi dijadikan menjadi salah satu isu penting yang memerlukan respon segera melalui komunitas global. Adapun aspek penting yang menjadi fokus utama dari *sustainable fashion* dalam penelitian ini adalah ketenagakerjaan di dalam Industri Mode di Indonesia. Sehingga kehadiran ILO disebabkan oleh, isu *sustainable fashion* yang terdapat di dalam industri mode di Indonesia merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia, akan tetapi hal ini mendorong urgensi ILO untuk melakukan upaya tambahan dalam mempromosikan isu *sustainable fashion*. Penelitian ini dapat dirangkum menjadi **“Bagaimana ILO menjalankan fungsinya sebagai organisasi antarpemerintah untuk meningkatkan perhatian Indonesia terhadap isu sustainable fashion pada tahun 2018-2020?”**. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa upaya ILO didasarkan pada penerapan tujuh fungsi organisasi antarpemerintah. Dengan menggunakan konsep fungsi organisasi antarpemerintah sebagai kerangka pemikiran, maka pembahasan dari penelitian ini, meliputi: memberikan hasil temuan di lapangan; menyediakan ruang diskusi bagi pemerintah; mempromosikan kesetaraan bagi para pekerja industri mode; menghasilkan peraturan fundamental yang diratifikasi; menunjukkan komitmen dengan membentuk badan pengawas; membentuk program BWI sebagai bentuk kolaborasi dengan IFC; meningkatkan kemampuan dari para tenaga kerja industri mode melalui program WEALTH dan MAMPU bagi pekerja industri di Indonesia. Dengan demikian, fungsi yang dijalankan oleh ILO di Indonesia merupakan bentuk dari tata kelola global yang diwujudkan melalui penyusunan upaya ILO dalam meningkatkan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap isu *sustainable fashion* di Indonesia. Dalam rangka mendukung kinerja pemerintah, langkah yang dilakukan ILO meliputi tindakan kolektif dengan melibatkan para pemegang kekuasaan terkait hukum maupun regulasi. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pemenuhan komitmen ILO menjadi bagian dari tata kelola global.

Kata kunci: *sustainable fashion*, Indonesia, ILO, organisasi antarpemerintah, tata kelola global

ABSTRACT

Name : Sri Nastiti Andra Pradipta

Student ID : 2017330051

Title : *The Efforts of International Labour Organization (ILO) in Promoting Sustainable Fashion in Indonesia*

The emergence of the term sustainable fashion itself is a form of applying 'ethical' fashion that becomes a contestant against the practice of unsustainable fashion. As a term known internationally, sustainable fashion is officially made one of the important issues that require an immediate response through the global community. The important aspect that became the main focus of sustainable fashion in this research is employment in the Fashion Industry in Indonesia. Therefore, the presence of ILO is due to the issue of sustainable fashion in the fashion industry in Indonesia is the responsibility of the Indonesian government, but this encourages the urgency of the ILO to make additional efforts in promoting sustainable fashion. This research can be summarized as *"How does the ILO perform its function as an intergovernmental organization to increase Indonesia's attention to the issue of sustainable fashion in 2018-2020?"*. The study found that the ILO's efforts were based on the implementation of seven intergovernmental organizational functions. By using the concept of Intergovernmental Organization functions as a theoretical framework, the discussion of this study, including: providing findings in the field; accommodate discussion space for the government; promoting equality for fashion industry workers; produce fundamentally ratified regulations; demonstrate commitment by establishing a supervisory body; establishing BWI programs as a form of collaboration with IFC; improving the capabilities of the fashion industry workforce through the WEALTH and MAMPU programs for industrial workers in Indonesia. Thus, the function carried out by the ILO in Indonesia is a form of global governance embodied through the preparation of ILO efforts in increasing the Attention of the Government of Indonesia on the issue of sustainable fashion in Indonesia. In order to support the government's performance, the ILO's measures include collective action involving holders of legal and regulatory powers. It can be concluded that this can be said as a form of fulfilling the commitment of the ILO to be part of global governance.

Keywords: sustainable fashion, Indonesia, ILO, intergovernmental organization, global governance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan mata kuliah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian yang berjudul *“Upaya International Labour Organization (ILO) dalam Mempromosikan Isu Sustainable Fashion di Indonesia”* ini mengkaji partisipasi organisasi antarpemerintah dalam mempromosikan isu internasional dalam rangka mendorong kontribusi pemerintah di dalamnya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru atau juga menjadi inspirasi untuk menyusun penelitian lainnya yang serupa.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan yang dapat diperbaiki di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis hendak memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Terlebih lagi, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi menyediakan penelitian yang lebih berguna serta dapat memberikan dampak positif dalam studi Hubungan Internasional. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca, dan dapat memicu solusi yang realistis yang dapat digunakan oleh pihak terkait dalam isu *sustainable fashion*.

Bandung, 12 Juli 2021

Sri Nastiti Andra Pradipta

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis mendapatkan banyak dukungan dan motivasi agar skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, penulis dapat memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan termasuk dapat menjalani kehidupan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung selama empat tahun masa studi hingga saat ini telah menyelesaikan tugas akhir.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang teramat dalam bagi **Papa dan Mama** atas berbagai bentuk dukungan, baik kasih sayang maupun perhatian yang tiada habisnya dari penulis kecil sampai penulis bisa meraih gelar Sarjana. Tak lupa, terima kasih bagi **Eyang Putri** sebagai salah satu orang yang penting bagi hidup penulis, doa Eyang selalu menemani penulis dimanapun dan kapanpun penulis berada. Dan bagi **Danniswara Putra**, terima kasih telah menjadi sumber hiburan yang selalu ada disaat penulis memerlukan kehadiran adik kecil yang tidak lagi kecil. Serta terima kasih untuk **asisten rumah tangga** yang penulis sayangi.

Ucapan selanjutnya, penulis ingin berterimakasih kepada **Mbak Mirei** sebagai dosen yang membimbing penulis dari awal penyusunan skripsi sampai pada saatnya sidang skripsi. Kemudian bagi **Mbak Nophie dan Mbak Sylvia**, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan yang telah diberikan pada saat penulis menjalani sidang skripsi. Tanpa kehadiran beliau-beliau, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Bagi *support system* selama berkuliah, **Audrey Dea Azzahra Palguna, Sabila Elsa Cerelia, Dave Benaiah Richard Hilliard, Aristides Bryan Christoff dan Ramandika Puji Prakoso**, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena tanpa kehadiran kalian di dalam hidup penulis tentu kehidupan perkuliahan tidak akan penuh dengan memori. Untuk **Audrey**, *I wouldn't want to know how my life's gonna be if we weren't friends, since you've played such a big role as a friend as well as my ride or die, Drix!* Untuk **Madame Delima** sebagai teman pesta kolesterol bersama penulis, *shall we pack our stuffs and head to the airport right away? Looking forward to our upcoming beach hopping trips, Bils!* Bagi **Benny**, pelawak kondang yang senantiasa menghibur dan menemani penulis pada berbagai situasi, *thank you so much for your kindness along the journey, it means a lot to me, Ben!* Bagi **Ateng**, teman yang selalu menguji kesabaran penulis, *I am glad that you're my frenemy for life, Teng!* Dan bagi **Rama**, *thank you Ram for picking up my drunk call at dawn.*

Teruntuk **Tiffany Angelica**, *from the moment that we've known each other and become friends in high school, I knew that we're gonna be neighbours in Swiss as well! And soon, we will be graduated from the same school for another round. Looking forward to see our cows while having chamomile tea as our upcoming rituals, Tiff!* Dan, bagi **Terasha Agrivinna**, *I will always remember our handshake on first day of high school, although it sounds corny as hell but thanks for being such a genuine friend yet as a supporter, Ter!* Tak ketinggalan, terima kasih bagi segenap sobat penulis yang memiliki jasa tak terhingga, **Bang Ghifari "Agee" Iman, Rachel Sanjaya, Verina Christi, Revo Sambora, Teresa Cindy, Gwenn Laethicia, Evan Widyastana, Om Marino**, atas berbagai kebaikan dan tawa yang tiada hentinya dan juga selalu menemani dan menghibur penulis di berbagai situasi maupun kondisi.

Ucapan selanjutnya penulis tujukan bagi **Ratna Novita Dewi, Yunda Angelica, Miralda Regina** dan **Intan Christy** sebagai teman-teman penulis semasa SMP yang masih berteman baik hingga saat ini, *I love y'all eternally!*

Kepada **Jessica Ruth alias Yerudh**, kalau bukan karena kita SKSD mungkin penulis akan kehilangan teman jompo sejati, *thank you Yer for believing in me!* Dan untuk **Maura**, sesuai dengan janji penulis, nama anda telah terpampang nyata di ucapan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menemukan *gap* masalah untuk skripsi ini. Serta untuk **Sophia**, penulis sangat berterimakasih atas kesempatan dalam menanggapi pertanyaan dan konsultasi yang

tiada habisnya dan juga semangat yang saling diberikan antara satu sama lain pada hari-hari penulisan skripsi.

Dan akhirnya, untuk rumah kedua yang selalu menjadi tempat *favourite* bagi penulis untuk mengerjakan tugas ataupun mengisi waktu luang, terima kasih sedalam-dalamnya bagi segenap kru dari **Mr. Fox Surabaya** maupun **Djournal Coffee PVJ**, jasa kalian akan selalu penulis kenang.

Akhir kata, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam bagi **Segenap Dosen dan Karyawan UNPAR, HI UNPAR Angkatan 2017, The Maple Place Residence, Lingkungan Ciumbuleuit, Delegasi PRAKDIP United Kingdom SEMONGKO, Kota Bandung** dan tentu saja **berbagai pihak yang tidak disebutkan tetapi berpengaruh besar terhadap penulis** atas berbagai pengalaman dan pelajaran berharga yang penulis syukuri dan akan rindukan. *It's been a pleasure for having you all as my essentials in Bandung, nonetheless the pandemic set us apart and forced us to live our current life virtually.*

Cheers, to many more adventures to come!

Yours truly,

2017330051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR AKRONIM.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	13
1.2.3 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	15
1.4 Kajian Literatur	15
1.5 Kerangka Pemikiran.....	21
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	25
1.6.1 Metode Penelitian.....	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.7 Sistematika Penelitian	26
BAB II KONDISI INDUSTRI MODE DI INDONESIA DAN TANTANGAN PEMERINTAH INDONESIA.....	27
2.1 Kondisi Industri Mode di Indonesia.....	27

2.1.1	Pentingnya Industri Mode di Indonesia	27
2.1.2	Kondisi Industri Mode Dilihat dari Aspek Sosial	31
2.2	Upaya Pemerintah Indonesia untuk Memperbaiki Kondisi Industri Mode di Indonesia	34
2.2.1	Hukum dan Regulasi sebagai Acuan Pemerintah Indonesia dalam Menerapkan Sustainable Fashion	34
2.2.2	Kebijakan dan Program yang Dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Sustainable Fashion di Indonesia	46
2.2.3	Tantangan dari Upaya Pemerintah	48
BAB III FUNGSI ILO DALAM MENINGKATKAN PERHATIAN		
PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ISU SUSTAINABLE FASHION		
DI INDONESIA..... 52		
3.1	Penyaluran Informasi tentang Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Indonesia	54
3.2	Penyediaan Ruang Diskusi bagi Pemerintah Indonesia Bersama Aktor Lain	57
3.3	Peningkatan Kesadaran terkait Kesetaraan bagi Para Pekerja Industri Mode	60
3.4	Penyusunan Landasan Fundamental ILO terkait Tenaga Kerja.....	63
3.5	Pembentukan Inisiatif ILO dalam Rangka Pengawasan Peraturan	66
3.6	Pemberian Dukungan terhadap Upaya Pemerintah Indonesia	68
3.7	Pengembangan Gagasan Lanjutan dalam Mempromosikan Isu Sustainable Fashion.....	70
KESIMPULAN..... 72		
DAFTAR PUSTAKA 76		

DAFTAR AKRONIM

BPS	: Badan Pusat Statistik
API	: Asosiasi Pertekstilan Indonesia
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
BWI	: Better Work Indonesia
IFC	: International Finance Corporation
ILO	: International Labour Organization
KNK	: Kader Norma Ketenagakerjaan
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
KSPI	: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UMSP	: Upah Minimum Sektoral Provinsi
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional merupakan salah satu bidang ilmu yang bersifat dinamis, dikarenakan adanya perkembangan signifikan pada ruang lingkup pembahasan, meliputi isu *low politics* (hak asasi manusia, lingkungan hidup dan ekonomi) ke dalamnya.¹ Dengan menggunakan kerangka berpikir Ilmu Hubungan Internasional, maka isu kontemporer berupa *sustainable fashion* serta implikasinya terhadap dunia internasional merupakan bagian dari dinamika fenomena internasional.

Industri mode merupakan salah satu dari sekian bentuk industri yang menjadi faktor penting terhadap perkembangan suatu negara, baik dari segi ekonomi maupun manufaktur. Kontribusi besar industri mode dapat dilihat melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pembangunan industri pada suatu negara. Sebanyak 430 juta jiwa terhitung sebagai pekerja dari industri mode yang bernilai \$2 triliun.² Di samping bahwa faktanya industri mode melalui *private sector* baik lokal maupun internasional turut berkontribusi dalam

¹ Bob Sugeng Hadiwinata dan Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional - Aktor, Isu dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1-4

² Clarelissaman, "Mapping the Fashion Industry: Introduction," Common Objective (Common Objective, May 14, 2018), <https://www.commonobjective.co/article/mapping-the-fashion-industry-introduction>.

meningkatkan nilai investasi di Indonesia, dari semula bernilai Rp 149.88 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 151.77 triliun (\$16.54 miliar) pada tahun selanjutnya.³ Selain itu, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) terdapat peningkatan sebesar 3.5% yang mendorong ekspansi perusahaan tekstil di Indonesia mengalami peningkatan dari 2.880 menjadi 2.980.⁴

Namun, dengan adanya faktor penting yang berpengaruh signifikan terhadap suatu negara justru berdampak terhadap perubahan sektor lingkungan dan sosial sebagai objek yang berperan di dalamnya. Dimana, industri mode bertanggung jawab atas 20% pencemaran air dan 10% emisi gas karbon di seluruh dunia.⁵ Hal ini mengarah pada terjadinya *unsustainable fashion*, yang mana seharusnya diperlukan oleh situasi saat ini adalah *sustainable fashion*.

Sustainable fashion memiliki pengertian sebagai inisiatif termasuk proses dalam mengupayakan perubahan pada industri mode serta sistem dari fashion menuju pada integritas ekologis serta keadilan sosial pada skala yang lebih besar.⁶ Hal ini pertama kali muncul sebagai topik hangat secara global pada bulan Desember 2018, dalam Konferensi UN Climate Change di Katowice yang bertempat di Polandia dan dikenal sebagai COP24.⁷ Adapun, agenda utama pada

³ Global Business Guide Indonesia, "Indonesia's Garment and Apparel Sector," GBG (Global Business Guide Indonesia, 2013), http://www.gbgingonesia.com/en/manufacturing/article/2012/indonesia_s_garment_and_apparel_sector.php.

⁴ Ibid

⁵ Kali Hawk 3 years ago et al., "Addressing Sustainability Issues in the Fashion Industry," Impactivate (Glenmede, November 16, 2020), <https://www.theimpactivate.com/how-is-the-fashion-industry-addressing-sustainability-issues/>.

⁶ Kate Flechter, "Sustainable fashion and textiles—design journeys." *Earthscan, London* (2008).

⁷ UNFCCC, "Milestone Fashion Industry Charter for Climate Action Launched," Connect4Climate, December 10, 2018, <https://www.connect4climate.org/initiative/fashion-industry-charter-climate-action-launched-cop24>.

konferensi tersebut adalah peluncuran Fashion Industry Charter for Climate Change yang disetujui sebagai upaya kolektif dalam menangani isu dampak terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh industri mode meliputi berbagai sektor di dalamnya.⁸ Dengan adanya konferensi tersebut dengan agenda utama peluncuran perjanjian internasional yang menyangkut keterlibatan berbagai pihak di dalam isu *sustainable fashion*, menjadikan isu tersebut sebagai isu penting berskala internasional. Terlebih dengan keberadaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memperkuat alasan terbentuknya perjanjian tersebut sebagai landasan dalam merespon isu *sustainable fashion*.⁹

Pada dasarnya *sustainable fashion* dikenal secara luas sebagai suatu pengembangan dari industri mode yang mengutamakan riwayat pengolahan produk dengan berbasis *ethical fashion*.¹⁰ Dengan berlandaskan pada *ethical fashion*, *sustainable fashion* merupakan bagian dari *slow fashion* yang menghasilkan dampak transformasi pada perilaku pihak produsen serta konsumen. Dimana para konsumen mengalami peningkatan kesadaran terhadap berbagai tahapan proses produksi dalam menghasilkan suatu produk mode. Sedangkan, pada pihak produsen, perubahan yang terjadi terdapat pada pengelolaan limbah pasca produksi serta kualitas dan kuantitas terkait material yang digunakan, maupun para pekerja

⁸ LIZZIE KNIGHT Associated Press, "Sustainability in the Fashion Industry Faces an Uphill Climb," ABC News (ABC News Network, January 7, 2020), <https://abcnews.go.com/Lifestyle/wireStory/correction-eu-fashion-sustainability-issues-story-68119669>.

⁹ "THE 17 GOALS | Sustainable Development," United Nations (United Nations), accessed April 7, 2021, <https://sdgs.un.org/goals>.

¹⁰ Claudia E. Henninger, Panayiota J. Alevizou, and Caroline J. Oates, "What Is Sustainable Fashion?," *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal* 20, no. 4 (March 2016): pp. 400-416, <https://doi.org/10.1108/jfmm-07-2015-0052>.

yang terlibat dalam kegiatan tersebut.¹¹ Kesadaran yang muncul oleh pihak konsumen secara filosofis mendukung dari nilai keberlangsungan untuk dapat tetap berjalan, dimana nilai yang dimaksud meliputi; situasi dan kondisi kerja yang mendukung serta potensi terhadap pengurangan kerusakan lingkungan.¹²

Terjadinya suatu fenomena internasional meliputi seluruh wilayah di dunia, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Secara khusus fenomena global menyangkut industri mode, berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia yang ditunjukkan pada perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 18% pada tahun 2015.¹³ Hal ini menunjukkan peningkatan PDB dari tahun 2013, yaitu sebesar 2% yang mencakup PDB nasional dan lebih dari 7% total hasil ekspor.¹⁴ Dalam sektor industri mode sendiri, selain berkontribusi terhadap pemasukan negara dalam hal PDB, sektor tersebut juga membuka 1.1 juta kesempatan lapangan pekerjaan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, dan menyerap tenaga kerja sebesar 1.3 juta pekerja di tahun 2011 yang kemudian meningkat secara signifikan menjadi 16 juta pekerja pada tahun 2016.¹⁵¹⁶ Dari angka tersebut tidak

¹¹ "WHAT IS SUSTAINABLE FASHION?," Green Strategy Sustainable and Circular Fashion Consulting, accessed March 5, 2021, <https://www.greenstrategy.se/sustainable-fashion/what-is-sustainable-fashion/>.

¹² Claudia E. Henninger, Panayiota J. Alevizou, and Caroline J. Oates. "What is sustainable fashion?." *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal* (2016): 400-416

¹³ Global Business Guide Indonesia, "Indonesia's Textile and Clothing Industry," GBG (Global Business Guide Indonesia, 2014), http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2014/indonesia_s_textile_and_clothing_industry.php.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Global Business Guide Indonesia, "Indonesia's Garment and Apparel Sector," GBG (Global Business Guide Indonesia, 2013), http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2012/indonesia_s_garment_and_apparel_sector.php.

¹⁶ Global Business Guide Indonesia, "Indonesia's Textile and Clothing Industry," 2014

menutup kemungkinan adanya peningkatan dalam jumlah penyerapan tenaga kerja di wilayah Indonesia.

Dalam mengkaji suatu fenomena internasional, diperlukan sudut pandang relevan yang dijadikan sebagai landasan. Fenomena *sustainable fashion* merupakan suatu bentuk upaya pengendalian industri mode yang mengacu pada keberlangsungan lingkungan dan komunitas sosial di dalamnya secara keseluruhan.¹⁷ Terjadinya fenomena tersebut mengubah cara pandang dunia internasional terhadap isu kontemporer, sehingga menghasilkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai tujuan kolektif yang berupaya untuk dicapai.¹⁸ Sebagai salah satu bentuk isu internasional yang memiliki ruang lingkup multiaspek, maka *sustainable fashion* merupakan bagian poin penting dari TPB tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan sektor swasta. Hal tersebut didukung oleh realita, dimana TPB disusun sebagai panduan terhadap pemenuhan tujuan dalam jangka panjang yang secara langsung melibatkan peran dari sektor swasta. Dan dari hal yang telah disebutkan, telah resmi menjadi urgensi internasional dalam melakukan kolaborasi antara aktor negara dan International Labour Organization (ILO) terkait isu yang bersangkutan.¹⁹

Bentuk realisasi dari kolaborasi yang dijalankan oleh institusi internasional bersama aktor negara selain Pemerintah Indonesia yaitu Australian Aid di Indonesia sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan terkait lingkungan dan sosial,

¹⁷ Jeanette Orminski, Edson C. Tandoc Jr., and Benjamin H. Detenber, “#Sustainablefashion – a Conceptual Framework for Sustainable Fashion Discourse on Twitter,” *Environmental Communication* 15, no. 1 (2020): pp. 1-3, <https://doi.org/10.1080/17524032.2020.1802321>.

¹⁸ “Home,” The UN Alliance for Sustainable Fashion, October 23, 2020, <https://unfashionalliance.org/>.

¹⁹ Ibid

terwujud dalam kerja sama internasional. Eksistensi dari kerja sama yang telah ada dalam pembahasan mengenai *sustainable fashion*, memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh perjanjian yang telah disepakati bersifat mengikat para anggota di dalamnya. Dan hal ini, memberikan konsekuensi terhadap negara anggota yang telah menyetujui melalui ratifikasi konvensi internasional untuk menjalankan berbagai protokol terkait tujuan yang dicapai. Dalam penelitian terkait *sustainable fashion* di Indonesia, maka perjanjian internasional dimaksudkan adalah konvensi International Labour Organization (ILO) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Keberadaan dari institusi tersebut merupakan bentuk respon terhadap inisiatif *sustainable fashion* dalam hal kondisi yang mencakup kualitas dari buruh pekerja di dalam industri *sustainable fashion* di Indonesia.²⁰ ILO menunjukkan komitmen dari kelangsungan program kerja yang dimiliki melalui pembentukan kerja sama dengan berbagai entitas dan organisasi di dalam PBB.²¹ Hubungan kerja sama yang dijalin dilandaskan pada urgensi dari objektif ILO terhadap pemberlakuan para pekerja sesuai dengan standar ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.²² Disamping hal tersebut, dibentuknya kerja sama antar entitas di dalam PBB memiliki tujuan untuk mencapai TPB. Mengingat, di dalam TPB terutama tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi mencakup unsur

²⁰ “UN Partnership on Sustainable Fashion and the SDGs,” UN Partnership on Sustainable Fashion and the SDGs, July 10, 2018, [https://www.ilo.org/newyork/news/WCMS_634927/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/newyork/news/WCMS_634927/lang-en/index.htm).

²¹ Ibid

²² Ibid

keberlanjutan, dimana hal tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh ILO.²³

Dengan demikian, penjelasan tersebut menggambarkan kurangnya tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia terhadap merespon fenomena internasional. Dimana, seharusnya unsur-unsur *sustainable fashion* menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Singkatnya, hal tersebut menunjukkan absensi Pemerintah Indonesia pada isu *sustainable fashion*.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif bersifat mengikat antara pihak pemerintah, bersama dengan pihak lain yang memiliki kapabilitas untuk bertanggung jawab atas pengelolaannya. Namun, upaya pemerintah tidak cukup untuk menangani isu yang dihadapi. Ketersediaan dari sumber daya dapat mengalami dua hal pada waktu bersamaan yaitu peningkatan nilai dari sumber daya dan penurunan jumlah ketersediaan sumber daya.²⁴ Peningkatan nilai pada sumber daya dapat memberikan pengaruh terhadap nilai ekonomis melalui berbagai tahapan proses pengolahan, termasuk pada industri mode.²⁵ Dalam konteks peningkatan nilai pada sumber daya, nilai ekonomis yang

²³ "THE 17 GOALS | Sustainable Development," United Nations (United Nations), accessed March 7, 2021, <https://sdgs.un.org/goals>.

²⁴ UN Environment Programme (UNEP), "Renewable Resources and Conflict," Renewable Resources and Conflict - the United Nations (United Nations, 2012), https://www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/pdfs/GN_Renew.pdf. p.52-53

²⁵ "Fixing Fashion: Clothing Consumption and Sustainability," Fixing fashion: clothing consumption and sustainability - UK Parliament, accessed March 8, 2021, <https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/full-report.html>.

meningkat sejalan dengan konsekuensi berupa penurunan kualitas serta kuantitas sumber daya akibat dari tindakan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.²⁶ Dimana, dalam jangka panjang penurunan jumlah sumber daya yang terjadi berjalan mengarah pada terbatasnya ketersediaan sumber daya, dan pada kenyataannya kerusakan terhadap lingkungan turut menjadi salah satu penyebab.²⁷

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa peningkatan yang terdapat pada pemanfaatan sumber daya dapat sekaligus memberikan pengaruh buruk terhadap keseimbangan ekosistem. Selain dari penjelasan mengenai peningkatan, penurunan juga turut memberikan pengaruh terhadap *sustainable fashion*. Dalam konteks tersebut, fokus utama terdapat pada aspek sosial menyangkut kesejahteraan buruh pekerja di belakang industri mode. Dimana, penurunan terbesar menunjukkan adanya kesenjangan perolehan pendapatan bagi para pekerja di berbagai negara dengan ketentuan upah minimum yang rendah.²⁸ Hal tersebut tidak dapat dihindari, karena adanya pertukaran komoditas berupa investasi yang diberikan oleh pihak investor berupa teknologi. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan upah pekerja yang ditentukan berdasarkan mata uang lokal setempat, sehingga dapat dilihat terdapat kesenjangan antara hasil produksi yang dipasarkan di negara investor yang bernilai biaya berkali-kali lipat dengan pendapatan para pekerja.²⁹

Idealnya gagasan *sustainable fashion* dapat dicapai dengan cara memenuhi kriteria dari berbagai aturan yang telah disepakati secara konsensus. Namun, realitanya hal tersebut mengalami beberapa hambatan penting yang menimbulkan

²⁶ UNEP, "Renewable Resources and Conflict", 2012: 17

²⁷ Ibid, p. 23

²⁸ Environmental Audit Committee, "Fixing Fashion: Clothing Consumption and Sustainability,"

²⁹ Ibid

urgensi berupa kegiatan *unsustainable fashion* masih marak terjadi di berbagai belahan dunia. Istilah dari *unsustainable fashion* dikenal sebagai kegiatan produk fashion yang menerapkan sistem produksi dalam waktu singkat dengan penggunaan biaya seminimal mungkin.³⁰ Salah satu bentuk dari kegiatan *unsustainable fashion* adalah *fast-fashion* atau ritel pakaian.³¹ Keberadaan dari permasalahan tersebut menjadikan tantangan tersendiri dalam mencapai *sustainable fashion*. Tanpa disadari, hingga saat ini kegiatan *unsustainable fashion* masih berlangsung, disebabkan oleh melekatnya berbagai nilai yang bersifat mengakar.³²

Eksistensi dari kegiatan *unsustainable fashion* mengandung unsur negatif dari apa yang menjadi inisiasi dari *sustainable fashion*. Salah satu unsur utama yang terkena dampaknya adalah lingkungan. Dimana, berdasarkan data yang diperoleh European Parliamentary Research Service (EPRS), pada tahun 2015 industri mode turut berkontribusi atas limbah yang dihasilkan sebesar 92 juta ton dan 1.715 juta ton emisi gas karbon serta sebanyak 79 miliar kubik meter (m³) air digunakan dalam industri mode.³³ Hal tersebut didukung dengan angka signifikan dalam penggunaan kuantitas air yang diperlukan dalam memproduksi satu potong kaos, yaitu sejumlah 2.700 liter air bersih.³⁴ Dengan adanya limbah industri yang

³⁰ Author Lindsey Reid, "Fast-Fashion: Unethical and Unsustainable," UAB Institute for Human Rights Blog, January 22, 2020, <https://sites.uab.edu/humanrights/2018/04/26/fast-fashion-unethical-and-unsustainable/>.

³¹ Ibid

³² Kirsi Niinimäki, "Ethical Foundations in Sustainable Fashion," *Textiles and Clothing Sustainability* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.1186/s40689-015-0002-1>.

³³ Šajna Nikolina, "Environmental Impact of The Textile and Clothing Industry," European Parliament, January 2019, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI\(2019\)633143_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf).

³⁴ Lieve Van Woensel and Sara Suna Lipp, "What If Fashion Were Good for The Planet?," European Parliamentary, September 2020,

dihasilkan maka, kualitas dari air bersih yang terdapat di permukaan 20% diantaranya telah terpapar polusi. Begitu juga dengan emisi gas yang turut mencemari udara dengan persentase sebesar 10%, dan angka tersebut memiliki dampak signifikan dibandingkan dengan emisi gas yang dihasilkan oleh transportasi udara maupun laut.³⁵

Di samping adanya permasalahan menyangkut aspek lingkungan, aspek sosial turut memperoleh dampak serius dari kegiatan industri mode yang bergerak dalam bidang *unsustainable fashion*. Kawasan Eropa memiliki angka konsumsi yang cukup besar terhadap industri mode dan pakaian, yaitu sebesar 70% diantaranya diimpor ke dalam Kawasan Eropa pada tahun 2013.³⁶ Sementara, sumber dari produk mode tersebut 58,4% berasal dari Kawasan Asia.³⁷ Dengan angka persentase yang mencakup sebagian besar keterlibatan salah satu negara di Asia yaitu Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menjadi aktor penting dalam industri mode. Hal tersebut didukung dengan keberadaan dari Indonesia menyediakan kesempatan kerja di industri mode dalam jumlah besar, meliputi 1.1 juta jiwa merupakan tenaga kerja yang mengisi lahan pekerjaan pada industri mode.³⁸

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/656296/EPRS_ATA\(2020\)656296_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/656296/EPRS_ATA(2020)656296_EN.pdf).

³⁵ Jan Huitema (Renew Europe, “The Impact of Textile Production and Waste on the Environment (Infographic): News: European Parliament,” The impact of textile production and waste on the environment (infographic) | News | European Parliament, March 3, 2021,

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographic>.

³⁶ Enrico D'Ambrogio, “Workers' Conditions in The Textile and Clothing Sector: Just An Asian Affair? Issues at Stake After The Rana Plaza Tragedy,” Briefing, August 2014,

<https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf>.

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

Fenomena dari ketenagakerjaan di dalam industri mode sebagai salah satu sektor yang berkembang secara signifikan bagi Pemerintah Indonesia, juga turut mengalami perubahan dalam hal penyerapan tenaga kerja industri. Pertumbuhan pada industri mode menunjukkan peningkatan melalui jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 3,6 juta jiwa di tahun 2018.³⁹ Meningkatnya angka tersebut, secara tidak langsung mendorong pertumbuhan industri mode Indonesia yang mencapai 18,98 persen pada tiga bulan pertama di tahun 2019.⁴⁰ Di samping pertumbuhan yang dialami oleh industri mode, juga ditemukan bahwa kegiatan industri tersebut juga dipengaruhi oleh tindakan eksploitasi dari perusahaan *fast-fashion* yang beroperasi di Indonesia, yang mana mayoritas merupakan perusahaan asing. Salah satu bentuk pelanggaran pada tenaga kerja atau buruh melibatkan perusahaan internasional UNIQLO dan PT. Jaba Garmino yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja perempuan serta memutuskan hubungan kerja tanpa memberikan kompensasi pada pihak pekerja yang dirugikan.⁴¹ Selain kasus UNIQLO, perusahaan ADIDAS dan Mizuno juga melakukan pelanggaran terhadap pekerja industri melalui tindakan pemutusan hubungan kerja serta juga ditemukan adanya tindakan diskriminasi di dalam industri mode di Indonesia.⁴² Dengan adanya

³⁹ “Kemenperin: Lampau 18 Persen, Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi,” Kementerian Perindustrian, May 12, 2019, <https://kemenperin.go.id/artikel/20666/Lampau-18-Persen,-Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi>, (diakses 25 Juli 2021)

⁴⁰ Samuel Pablo, “Kuartal I-2019, Industri Tekstil TUMBUH MELESAT 18,98%,” CNBC Indonesia, May 12, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190512155421-4-71949/kuartal-i-2019-industri-tekstil-tumbuh-melesat-1898>, (diakses 25 Juli 2021)

⁴¹ “Uniqlo and The Women Owed \$5.5 Million,” Clean Clothes Campaign, March 9, 2021, <https://cleanclothes.org/news/2020/uniqlo-and-the-women-owed-55-million>, (diakses 25 Juli 2021)

⁴² “Adidas and Mizuno Involved in Unfair Dismissal Case,” Clean Clothes Campaign, November 20, 2015, <https://cleanclothes.org/news/2015/08/26/adidas-and-mizuno-involved-in-unfair-dismissal-case>, (diakses 25 Juli 2021)

fenomena tersebut, menjadi bukti bahwa industri mode di Indonesia rentan terjadi pelanggaran terhadap para pekerja industri.

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat diketahui bahwa industri tekstil menjadi salah satu aset utama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Dan, memiliki harapan tinggi terhadap kontribusi pemasukan negara. Akan tetapi, di sisi lain Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memperoleh keuntungan dan justru hal yang terjadi adalah sebaliknya. Mayoritas negara-negara di Kawasan Eropa serta Amerika merupakan pihak investor yang mengalirkan dana untuk kebutuhan industri tekstil dengan biaya rendah dan dalam kuantitas besar. Hal tersebut menyebabkan para pekerja dari negara yang mayoritas bergantung pada dinamika industri tekstil berada pada situasi “*slave labour*”.⁴³

Permasalahan mengenai *sustainable fashion* merupakan permasalahan yang terjadi pada skala global, sehingga memerlukan wadah dalam pembentukan keputusan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan di dalamnya. Sehingga memerlukan kajian yang bersifat mendalam untuk mengetahui landasan sistem yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang. Pada isu global terkait *sustainable fashion*, proses pengkajian suatu masalah serta penyusunan resolusi melibatkan institusi internasional berupa International Labour Organization (ILO) yang berperan sebagai institusi yang menyangkut tentang buruh atau pekerja industri. Implementasi dari wadah tersebut diperlukan, karena upaya Pemerintah di Indonesia yang telah disepakati tidak berjalan sesuai dengan harapan dan bahkan

⁴³ Enrico D'Ambrogio, “Workers' Conditions in The Textile and Clothing Sector: Just An Asian Affair? Issues at Stake After The Rana Plaza Tragedy,”

berpotensi minimal dari kata berhasil. Oleh sebab itu, dengan adanya wadah internasional, maka segala kepentingan terkait upaya dalam mempromosikan *sustainable fashion* melalui institusi internasional di dalamnya menjadi wujud implementasi tata kelola global. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian, karena kajian dilakukan untuk membahas tentang inisiatif yang timbul dari ILO sebagai institusi internasional dalam mempromosikan *sustainable fashion* di Indonesia yang mengacu pada tujuan jangka panjang, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada tindakan ILO dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi antarpemerintah dalam meningkatkan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap isu *sustainable fashion* di Indonesia. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan pengkajian pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Penggunaan kurun waktu yang dimulai dari tahun 2018, disebabkan oleh isu *sustainable fashion* pertama kali diresmikan pada konferensi internasional COP24 dengan menghasilkan perjanjian internasional berupa *Fashion Industry Charter for Climate Change*. Selain itu, alasan dari menggunakan batasan tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menghambat dan merubah program dari ILO terhadap isu *sustainable fashion*.

Oleh sebab itu, penelitian yang disusun oleh penulis mengkaji terkait tata kelola global melalui kontribusi dari ILO. Dimana, topik *sustainable fashion* mencakup permasalahan berupa aspek sosial sebagai fokus utama dari penelitian. Dengan merujuk pada keberlangsungan aspek sosial melalui inisiatif kolektif, maka

topik pembahasan dari penelitian dilandaskan pada tata kelola global yang secara spesifik merujuk pada fungsi organisasi antarpemerintah sebagai gambaran ILO dalam mempromosikan *sustainable fashion* di Indonesia.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan menjadi: “*Bagaimana ILO menjalankan fungsinya sebagai organisasi antarpemerintah untuk meningkatkan perhatian Indonesia terhadap isu sustainable fashion pada tahun 2018-2020?*”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari disusunnya penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai fungsi ILO sebagai organisasi antarpemerintah yang dijalankan untuk mengisi minimnya perhatian pemerintah terhadap isu kontemporer berupa *sustainable fashion* sebagai bentuk tanggung jawab terkait ketenagakerjaan di dalam industri mode. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemegang kuasa, meliputi: pemerintah beserta organisasi internasional bersama pihak pengusaha industri mode; dalam menyusun kebijakan yang dapat meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup dari pekerja industri mode di dalamnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui penyusunan dari penelitian ini, penulis memiliki harapan bagi para pembaca agar dapat memahami implementasi dari *sustainable fashion* melalui kontribusi suatu institusi internasional; menghasilkan efek jangka panjang terhadap keberlangsungan industri mode di Indonesia maupun secara global. Selain itu, penulis berharap pada pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang perkembangan dari ILO dalam merespon serta aspek penanganan terhadap isu lingkungan. Disamping itu, implementasi dari fungsi organisasi internasional dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.4 Kajian Literatur

Literatur pertama yang digunakan dalam meneliti lebih lanjut terkait implementasi dari tata kelola global terhadap *sustainable fashion* adalah *Global Governance? Complexity, Authority, Power, Change* oleh Thomas G. Weiss dan Rorden Wilkinson. Menurut Weiss dan Wilkinson, tata kelola global yang telah ada rentan terhadap ambiguitas.⁴⁴ Dimana, adanya pemahaman ganda atas suatu konsep yang digunakan dalam menganalisis isu internasional, dan hal tersebut juga sekaligus memberikan kesempatan untuk menginterpretasikan suatu permasalahan dengan pemahaman yang cenderung mengambang.⁴⁵ Bagi Weiss dan Wilkinson,

⁴⁴ Thomas G. Weiss and Rorden Wilkinson, "Rethinking Global Governance? Complexity, Authority, Power, Change," OUP Academic (Oxford University Press, March 19, 2014), <https://doi.org/10.1111/isqu.12082>.

⁴⁵ Ibid

menyesuaikan perspektif yang telah ada menjadi suatu tantangan bagi tatanan internasional.

Perubahan secara signifikan telah terjadi di dalam Hubungan Internasional, dimana terdapat berbagai kesempatan baru terbuka untuk menjadi landasan valid atas eksistensi isu internasional. Terbukanya kesempatan tidak selalu dipandang sebagai hal yang positif, jika menggunakan sudut pandang berbeda yang telah diperbarui. Oleh sebab itu, pada kenyataannya terdapat pergeseran struktur kekuasaan yang semula berpusat pada negara menjadi terlibatnya aktor selain negara yang turut mengatur mekanisme internasional.⁴⁶ Dalam tulisan tersebut, konsep dari tata kelola global meliputi berbagai respon terhadap isu internasional melalui kerja sama kooperatif secara formal maupun informal. Adapun tindakan kooperatif yang dimaksud oleh Weiss dan Wilkinson merujuk pada kontribusi organisasi antarpemerintah sebagai acuan utama dalam mekanisme tatanan internasional. Sehingga, menjadikan organisasi antarpemerintah pada tulisan dari Weiss dan Wilkinson sebagai fokus utama di dalam tata kelola global.⁴⁷

Penjelasan terkait posisi tata kelola global dalam dunia internasional kemudian diperkuat oleh tulisan Luca Montanarella dan Ronald Vargas melalui *Global Governance of Soil Resources as a Necessary Condition for Sustainable Development*. Tulisan Montanarella dan Vargas menjelaskan tentang keberadaan dari kerangka pemikiran yang telah ada tidak dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam menangani isu internasional, dalam hal ini terkait pengelolaan

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

tanah secara global dalam rangka pembangunan berkelanjutan.⁴⁸ Pada saat ini, urgensi tatanan global mengalami perubahan arah, dari yang semula berfokus pada isu *high politics* kemudian memberikan perhatian yang setara terhadap isu *low politics*. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pergantian tersebut didorong oleh adanya perubahan iklim yang memaksa masyarakat global untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Mengingat adanya tujuan jangka panjang yang perlu untuk dicapai.

Melalui tulisannya, Montanarella dan Vargas memberikan prediksi terhadap potensi terjadinya ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatnya jumlah populasi global. Hal ini menjadi *point* yang menarik, karena disebabkan oleh kurangnya efisiensi pemetaan konsep tata kelola global sebelumnya untuk dijadikan sebagai landasan kebijakan. Pada tulisan tersebut, dikatakan bahwa dibutuhkan kerangka baru dengan berdasarkan pada kerja sama yang melibatkan kontribusi dari berbagai pihak, baik pada skala lokal maupun global.⁴⁹ Adapun kerja sama yang dimaksud oleh Montanarella dan Vargas, diharuskan untuk melibatkan organisasi antarpemerintah yang memiliki esensi dasar dalam menentukan landasan hukum terkait isu yang dibahas. Sehingga, komunitas internasional memegang peranan penting dalam penyusunan kerangka baru untuk menentukan fokus terhadap langkah yang efektif dalam menangani isu internasional. Dalam tulisan tersebut,

⁴⁸ Luca Montanarella and Ronald Vargas, "Global Governance of Soil Resources as a Necessary Condition for Sustainable Development," *Current Opinion in Environmental Sustainability* (Elsevier, June 29, 2012), <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2012.06.007>.

⁴⁹ Ibid

komunitas internasional yang dimaksud merupakan organisasi antarpemerintah selaku pemegang otoritas tinggi selain negara dalam tata kelola global.

Dalam literatur lainnya, penggunaan dari tata kelola global dapat dikenali secara jelas oleh para akademisi Hubungan Internasional melalui berbagai faktor, salah satu diantaranya dengan mengidentifikasi penggunaan indikator. Bagi Kevin E. Davis, Benedict Kingsbury dan Sally Engle Merry sebagai penyusun literatur *Indicators as a Technology of Global Governance* yang dikaji dalam penelitian, mengatakan bahwa indikator memiliki peran penting terhadap implementasi dari tata kelola global.⁵⁰ Dikatakan juga, indikator yang dimaksud hadir dapat berperan sebagai alternatif serta objek dari suatu kebijakan.⁵¹ Menurut Davis, Kingsbury dan Merry, penggunaan dari indikator dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan serta dapat melengkapi kekurangan dari suatu data.⁵² Sehingga, indikator yang dimaksud dapat diartikan sebagai penyeimbang atas ketidakstabilan.

Dalam konteks pembahasan tata kelola global, indikator dapat mempengaruhi proses pembentukan keputusan yang akan berdampak pada penetapan suatu kebijakan. Penggunaan dari indikator sendiri, pada dasarnya menjadi acuan bagi pihak yang memiliki kekuatan terhadap perihal yang sedang dikendalikan. Pihak organisasi antarpemerintah seringkali hadir sebagai pihak yang melandasi tata kelola global, karena sumber dari suatu pandangan berasal dari pihak yang menghasilkan regulasi. Hal ini cukup menggambarkan bagaimana tata kelola

⁵⁰ Kevin E. Davis, Benedict Kingsbury, and Sally Engle Merry, "Indicators as a Technology of Global Governance," Wiley Online Library (John Wiley & Sons, Ltd, April 12, 2012), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5893.2012.00473.x>.

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

global yang dikendalikan oleh organisasi antarpemerintah dapat mempengaruhi suatu isu internasional, dengan mengendalikan pandangan dari pihak independen seperti organisasi non-antarpemerintah. Sehingga, Davis, Kingsbury dan Merry memandang bahwa terdapat ketimpangan di dalam konsep tata kelola global, antara pihak yang berpengaruh seperti organisasi antarpemerintah dengan pihak independen seperti organisasi non-antarpemerintah.

Argumen dari Davis, Kingsbury dan Merry diperkuat dengan tulisan dari Tero Erkkilä yang berjudul *Global Governance Indices as Policy Instruments: Actionability, Transparency and Comparative Policy Analysis*. Di dalam tulisan tersebut, Erkkilä mengatakan tata kelola global yang saat ini berada pada dunia internasional merupakan indikator yang terbaru dan dapat mengupayakan transparansi atas terbentuknya suatu kerja sama internasional.⁵³ Perubahan dari suatu pemerintahan yang digunakan sebagai indikator dalam menilai pemerintahan global, pada dasarnya dilandaskan atas beberapa hal; transparansi, dimana ketersediaan data bersifat mudah untuk diakses dan tidak memancing kontroversial terhadap suatu rezim politik; ketersediaan, terhadap suatu data memiliki sifat cakupan yang luas dan berlangsung secara terus menerus atau tidak terputus pada suatu periode waktu; kualitas dan akurasi, menyangkut konsistensi pada suatu pengukuran yang valid dan mencakup secara global; dan spesifikasi, yang membahas tentang penggunaan dari indikator bersifat independen dan tidak mempengaruhi pengukuran.⁵⁴

⁵³ Tero Erkkilä, "Global Governance Indices as Policy Instruments: Actionability, Transparency and Comparative Policy Analysis," May 13, 2015, <https://doi.org/10.1080/13876988.2015.1023052>.

⁵⁴ Ibid

Berdasarkan tulisan dari Erkkilä, tata kelola global versi terbaru yang dijadikan sebagai indikator mengundang berbagai aktor baru dengan perspektif yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai suatu pedoman dasar. Dalam penjelasan terkait konsep tata kelola global, kehadiran dari transparansi internasional dihadapkan pada tantangan berupa konflik “politisasi”. Pada politisasi tersebut, pihak dengan otoritas tinggi memiliki kapabilitas untuk menentukan sistematika tata kelola global melalui adanya dependensi terhadap pihak independen. Dimana, hal ini menjadikan pihak independen seperti NGO sebagai fokus utama, yang disebabkan oleh adanya kontribusi signifikan dalam memberikan sumber relevan kepada pihak dengan otoritas yang lebih tinggi seperti organisasi antarpemerintah. Sehingga, hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai *status quo* yang telah berlaku untuk melalui proses pengkajian ulang agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.⁵⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa argumen Erkkilä terhadap tata kelola global berpihak pada NGO sebagai komponen utama di dalamnya.

Melalui keempat literatur yang telah dibaca dan dikaji oleh penulis, penulis menemukan adanya kesamaan di dalamnya, yaitu keberlangsungan dari tata kelola global didukung oleh peran aktor lain selain aktor negara. Akan tetapi, disamping kesamaan terdapat juga kesenjangan dari keempat literatur yang disebutkan. Pada literatur pertama yang ditulis oleh Weiss dan Wilkinson, landasan dasar dari tata kelola global terletak pada organisasi antarpemerintah dalam melaksanakan kerja sama kooperatif terhadap penanganan isu global. Dan pada literatur kedua,

⁵⁵ Ibid

Montanarella dan Vargas menyampaikan bahwa keterlibatan pihak organisasi antarpemerintah dapat mendorong efektivitas pembentukan kerangka yang dapat mengakomodasi kepentingan dari komunitas internasional secara keseluruhan. Sedangkan pada tulisan karya Davis, Kingsbury dan Merry, kontribusi utama terhadap tata kelola global terletak pada pihak independen seperti organisasi non-pemerintah. Dimana, hal tersebut didukung dengan argumen pada tulisan Erkkilä mengenai posisi NGO sebagai aktor penting di dalam tata kelola global.

Dengan adanya keempat literatur dengan masing-masing argumen dan objektivitas terkait tata kelola global, memberikan gambaran penting bagi penulis dalam menentukan posisi penelitian yang akan berfokus pada fungsi organisasi antarpemerintah dalam menjalankan tata kelola global terhadap isu *sustainable fashion* di Indonesia. Mengingat, eksistensi dari *sustainable fashion* diakui pada skala global sebagai isu yang perlu penanganan dari berbagai pihak internasional. Adapun perbedaan yang memberdakan antara penelitian yang disusun dengan literatur yang dikaji adalah penelitian ini berfokus pada Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam membahas tentang upaya dari ILO, diperlukan kerangka pemikiran yang sejalan dengan topik penelitian yang disusun. Adapun konsep yang digunakan dalam pembahasan terkait upaya dari suatu wadah internasional merujuk pada organisasi antarpemerintah sebagai bagian dari tata kelola global. Konsep tersebut terdapat di dalam karya tulis yang disusun oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst

dan Kendall W. Stiles dengan judul *International Organizations: The Politics and Processes*.

Tata kelola global berawal dari suatu pergerakan isu internasional yang bersifat dinamis dari masa ke masa. Adapun korelasi antara tata kelola global dan organisasi antarpemerintah dapat ditunjukkan dalam menjelaskan suatu fenomena internasional yang melibatkan kolaborasi antara pihak negara dan pihak non-negara dalam mencapai tujuan kolektif. Dan dari kolaboratif tersebut, mendorong kemunculan dari konsep yang dikenal sebagai tata kelola global dengan esensi utama berupa pihak yang berkepentingan secara institusional serta sektor swasta maupun publik mengupayakan jalur tengah bagi kepentingan pihak yang terlibat.⁵⁶

Pada fenomena ketenagakerjaan di dalam industri mode, tata kelola global menjadi hal yang relevan dengan menindaklanjuti fungsi dari ILO dalam mempromosikan *sustainable fashion* disebabkan oleh ketiadaan struktur hirarki yang menjadi esensi utama dalam menjelaskan fenomena internasional. Melainkan, hal utama yang menjadi esensi adalah sinergi kolektif antara berbagai pihak dalam dunia internasional dalam menciptakan dan mengoptimalkan kesempatan untuk memperluas jangkauan kerja sama internasional.⁵⁷ Pada tata kelola global sebagai konsep secara dasar, terdapat fungsi dari institusi internasional yang dapat diterapkan pada fenomena internasional, termasuk upaya dari ILO dalam mempromosikan *sustainable fashion*. Fungsi yang dimaksud berupa indikator yang menjadi acuan dalam menentukan arah kerja sama, terlebih hal ini sekaligus

⁵⁶ Tero Erkkilä, "Global Governance Indices as Policy Instruments: Actionability, Transparency and Comparative Policy Analysis,"

⁵⁷ Ibid; 4-5

menjadi keunggulan bagi tata kelola global sebagai suatu konsep yang mengikuti perkembangan zaman terlebih setelah kemunculan globalisasi.⁵⁸

Pada penerapannya terhadap ILO, konsep fungsi organisasi antarpemerintah dapat digunakan dalam menjelaskan kontribusi dari institusi internasional terhadap kekosongan peran pemerintah suatu negara terhadap isu *unsustainable fashion* yang terjadi dengan mengupayakan hasil akhir berupa tindakan kolaboratif sebagai bentuk dari komitmen kemitraan. Terlebih konsep tersebut merupakan komponen penting dari tata kelola global. Berdasarkan sumber yang sama yaitu tulisan Karns dan Mingst dalam judul serupa, fungsi dari organisasi antarpemerintah terbagi atas beberapa bagian, meliputi: informasional, forum, normatif, pembentukan peraturan, pengawasan peraturan, operasional dan pengembangan gagasan.

Fungsi pertama dari organisasi antar pemerintah adalah **informasional**, dimana fungsi tersebut memiliki cakupan dalam hal mengumpulkan data terkait *unsustainable fashion* yang terjadi untuk kemudian dianalisis mengenai permasalahan terkait dan kemudian menyebarkan hasil akhir berupa laporan pengolahan data.⁵⁹

Selanjutnya terdapat fungsi **forum**, yaitu menyediakan wadah yang dipergunakan para aktor yang terlibat untuk memberikan pandangan masing-masing dan kemudian disalurkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Hal

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles, *International organizations: the politics and processes of global governance*, 3rd ed, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2013.), hal. 27

tersebut sesuai dengan peran dari ILO dalam menanggapi fenomena *unsustainable fashion*.⁶⁰

Normatif menjadi salah satu fungsi dasar dari organisasi antarpemerintah yang berperan dalam mendefinisikan suatu perilaku standar, atau dengan kata lain organisasi antar pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menentukan batasan-batasan dasar terhadap suatu tindakan yang dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan.⁶¹

Adapun fungsi keempat dari organisasi antar pemerintah, yaitu **pembentukan peraturan** dengan penjelasan sebagai otoritas yang memiliki kapasitas dalam penyusunan suatu kebijakan dengan sifat mengikat para aktor di dalamnya untuk mengikuti hasil akhir dari kebijakan yang dihasilkan.⁶²

Fungsi selanjutnya yaitu **pengawasan peraturan**, yang dimaksudkan dari fungsi tersebut adalah mengawasi para aktor yang terlibat untuk tetap patuh terhadap hasil akhir berupa kebijakan yang bersifat mengikat, dimana selain mengawasi ILO juga berkapabilitas dalam menegakan perselisihan yang mungkin terjadi, dan juga memberikan tindakan yang solutif.⁶³

Operasional menjadi fungsi dari organisasi antarpemerintah lainnya yang memiliki peran sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan bantuan termasuk dalam hal sumber daya dan teknis, dalam rangka memastikan keberlangsungan dari hubungan kerja sama yang terjalin.⁶⁴

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

Dan fungsi terakhir dari organisasi antarpemerintah yaitu **pengembangan gagasan** (*idea generation*), memiliki arti sebagai kapabilitas organisasi antarpemerintah meliputi penyusunan ide atau gagasan penting terkait langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi secara kolektif.⁶⁵

Berdasarkan penjabaran konsep fungsi dari Intergovernmental Organizations yang diperoleh dari karya Karns dan Mingst, ILO memiliki kesinambungan antara peran dari institusi tersebut dengan konsep yang telah dijelaskan. Karena, pada dasarnya keberadaan dari institusi internasional bertujuan untuk menjembatani upaya yang dilakukan dan tujuan bersama melalui upaya kolektif atas kontribusi aktor lain yang terlibat.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada proses penyusunan karya tulis merujuk pada penelitian secara kualitatif atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan berbasis pada pengolahan data secara deskriptif. Dalam menyusun penelitian berbentuk kualitatif dilakukan melalui studi kasus serta program.⁶⁶ Metode tersebut relevan dengan topik penelitian yang membahas tentang ILO menjalankan fungsi dalam mempromosikan *sustainable fashion*.

⁶⁵ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles, *International organizations: the politics and processes of global governance*, hal. 27

⁶⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative Quantitative and Mixed Method Approaches*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2009), hal.175-176

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Sehingga pengumpulan data dapat diperoleh melalui surat kabar, majalah, jurnal, dokumen resmi dan laporan resmi yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis berdasarkan sistematika penulisan penelitian.

1.7 Sistematika Penelitian

Pembahasan penelitian akan dibagi menjadi lima bagian berdasarkan sistematika penulisan penelitian.

BAB I meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan dari topik yang akan diteliti oleh penulis.

BAB II akan menjelaskan anomali permasalahan yang disebabkan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk kondisi dari industri mode di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani isu *sustainable fashion* di Indonesia, serta tantangan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi harapan dari ILO terkait penanganan isu ketenagakerjaan industri mode perihal *sustainable fashion* di Indonesia.

BAB III akan memaparkan tentang analisis terkait upaya ILO dalam mempromosikan *sustainable fashion*, meliputi: alasan absennya Pemerintah

Indonesia dalam isu sustainable fashion, implementasi legal binding ILO terhadap isu sustainable fashion di Indonesia, upaya ILO selain menggunakan legal binding untuk meningkatkan kesadaran tentang *sustainable fashion* pada masyarakat Indonesia; beserta dengan dampak *sustainable fashion* yang dihasilkan.

BAB IV menjadi akhir dari penelitian dengan berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran melalui penelitian yang ditulis.